



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

2025



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-198/ITDA/SET.II/100.3.3/02/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)/
RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka setiap entitas akuntansi wajib menyusun dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) dengan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : a. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini bertugas antara lain :
1. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;
 3. Menyusun Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat yang berisi program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berlaku dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan atau Rencana Kerja (RENJA) beserta Perubahan Tahun 2025; (Terlampir)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 19 Februari 2024



H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I
NIP. 197909012001121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-198/ITDA/SET.II/100.3.3/02/2024
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

- A. Pengarah : Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
- C. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah III
- D. Wakil Ketua : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- E. Sekretaris : Perencana Muda Sub Koordinator Penyusunan Program & Keuangan
- F. Anggota : 1. Kepala Subbag. Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Perencana Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR,

H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I
NIP. 19700812001121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Renja ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi pengawasan sehingga Renja Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam satu tahun ke depan. Perubahan paradigma Inspektorat Daerah saat ini dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau Penjamin Mutu dan *consulting partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *early warning system* atau sebagai sistem peringatan dini. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa atau *watch dog* saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, meskipun demikian kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, Juli 2024
Inspektur,

H. Heriansyah, SE, M.Si., CGCAE., CPSP
Pembina Tingkat I
NIP. 197908012001121001

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	li
DAFTAR TABEL.....	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....	20
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT.....	22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	24
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	39
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	39
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	41
BAB V PENUTUP.....	53
A CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA.....	53
B KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN.....	53
C RENCANA TINDAK LANJUT.....	54

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel TC - 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	10
Tabel TC - 30 Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	21
Tabel TC - 31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	27
Tabel TC - 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	38
Tabel TC - 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	45

BAB I
PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari tugas pokok tersebut maka disusunlah sasaran kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran kinerja tersebut memiliki beberapa indikator pengukuran kinerja yang paling utama yaitu persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Saat ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan dari masyarakat, sehingga pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebuah perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. **Good Governance** merupakan salah satu prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah, sehingga diharapkan ke depannya pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dipantau dan dievaluasi dengan sangat baik dan terukur. Selain itu ke depannya dapat dilakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan proses penetapan indikator kinerja tahunan perangkat daerah berdasarkan kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode 2021-2026, yang disesuaikan dengan RKPD Tahun Anggaran 2025.

Proses perencanaan kinerja tahunan ini merupakan suatu dasar dalam menganalisis permasalahan dan akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang, serta untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Renja ini akan dicantumkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terperinci sebagai bentuk terjemahan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengelolaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang dibutuhkan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar landasan hukum penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6485) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renja Inspektorat Daerah ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dalam Renja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Renja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terperinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode Renstra.
- (2) Sebagai salah satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Bab ini akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah yang akan membahas tentang capaian tahun sebelumnya dan capaian yang tercantum dalam dokumen Renstra. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan beserta dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Selanjutnya akan membahas tentang hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang dilakukan oleh tim perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta dengan hasil telaah terhadap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan masyarakat selaku salah satu *stakeholder*.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja perangkat daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra perangkat daerah tersebut yang kemudian akan diukur pencapaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan penyusunan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan pencapaian kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan

lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2023 telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini. Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran yang disediakan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah sebesar Rp. **34.516.174.628,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **27.588.702.390,-** atau tercapai **79,93 %**. Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target nilai 82 hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang dilakukan penilaian pada tahun 2023 memperoleh nilai **84,90** dengan kategori **A** dan dapat diinterpretasikan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat kemudian tercapainya target Penilaian Kapabilitas APIP ke Level 3 dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pagu Perubahan yang disediakan pada program ini sebesar Rp. **10.750.000.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **5.716.816.403,-** atau mencapai **53,18%**. Untuk indikator kinerja Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan yang ditargetkan **96%** dengan realisasi **168%**.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pagu Anggaran Perubahan yang disediakan untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. **3.750.000.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **2.306.264.672,-** atau mencapai **61,50%**.

Sedangkan untuk Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target **65%** Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP tercapai seratus persen dari target yang berarti telah tercapai target sesuai yang direncanakan.

Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan

juga adanya Komitmen Perangkat Daerah diantaranya dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi), juga dalam Penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention), Pencapaian Target LHKASN, serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Secara keseluruhan untuk Program pada tahun 2023 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, hanya saja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal sudah dilaksanakan pada tahap persiapan, dalam perjalanannya untuk kerjasama pengawasan internal belum ada terbentuk kesepakatan.

Berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC - 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	84,9 Nilai	82 Nilai	84,90 Nilai	103,5	85 Nilai	82 Nilai	91
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100	3 Level	3 Level	100
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	8 Dokumen	26 Dokumen	86,67

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	12 Dokumen	60
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokumen	60
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5880 Orang/ bulan	2280 Orang/ bulan	1260 Orang/ bulan	1209 Orang/ bulan	95,95	1260 Orang/ bulan	3489 Orang/ bulan	59,34
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100

2025
RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	133
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	1 Paket	50
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	30 Orang	150 Orang	181 Orang	120,67	100 Orang	211 Orang	141
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	100 Orang	155 Orang	155	70 Orang	190 Orang	108,57

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	135 Orang	224 Orang	165,93	110 Orang	369 Orang	210,86
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100	6 Layanan	6 Layanan	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	6 Paket	150
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	21 Paket	111
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	150	3 Paket	8 Paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100	90 Laporan	190 Laporan	76

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100	350 Dokumen	850 Dokumen	68
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	414 Unit	30 Unit	171 Unit	168 Unit	98,25	171 Unit	369 Unit	89,13
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100	-	5 Unit	100
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	-	8 Unit	7 Unit	87,50	-	7 Unit	88
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	400 Unit	30 Unit	157 Unit	155 Unit	98,73	170 Unit	355 Unit	89
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	18 Unit	15 Unit	18 Unit	18 Unit	100	15 Unit	15 Unit	83,33
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit	100	6 Unit	6 Unit	86

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	93 Persen	96 Persen	168 Persen	175	96 Persen	96 Persen	99
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	70 Dokumen	207 Dokumen	71 Dokumen	71 Dokumen	100	97 Dokumen	67 Dokumen	96
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	28 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	59 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	41 Laporan	107,89	40 Laporan	38 Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9 Kesepakatan	- Kesepakatan	3 Kesepakatan	- Kesepakatan	-	3 Kesepakatan	- Kesepakatan	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	18 Dokumen	19 Dokumen	45 Dokumen	237	19 Dokumen	19 Dokumen	100

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	14 Laporan	15 Laporan	41 Laporan	273,33	15 Laporan	15 Laporan	100
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100 Persen	55 Persen	65 Persen	65 Persen	100	75 Persen	75 Persen	75
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	60
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	60

2025
RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	83 Dokumen	77 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	100	83 Dokumen	83 Dokumen	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Penyusunan RENJA tahun 2023 telah menargetkan 80 % untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 89,22%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 71 % tingkat penyelesaiannya menjadi 76,94 %.

Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 92 % tercapai 82%, Hal ini terjadi karena adanya Laporan yang berbatas waktu penanganan (Pengaduan Lelang), sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam tahap penugasan yang bersamaan, dan adanya laporan yang masuk di penghujung tahun.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 Nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 Nilai.

Tabel TC - 30

Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	5	6	7	7	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI			80	82	84	86	89,22	-	84	86	Target Terpenuhi
2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP			71	74	77	79	76,94	-	77	79	Target Terpenuhi
3	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti			92	94	96	98	82	-	96	98	Target Tidak terpenuhi
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			3	3	3	4	3	-	3	4	Target Terpenuhi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai unsur Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh antara lain:
 - a) Membantu Bupati dalam Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah;
 - b) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) peran Inspektorat adalah mengawal pelaksanaan kegiatan yang terkait persiapan pembangunan ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah;
6. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;
7. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya Good Governance; dan
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah satu hal yang

sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik.

Selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah dan obyek pengawasan, dimana Dengan Luasan wilayah Pengawasan dan jumlah Auditan yang terdiri dari 39 Perangkat Daerah, 20 Kecamatan, 193 Desa, dan 32 Puskesmas serta 3 Rumah sakit sebagai pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 Sekolah sebagai penerima Dana BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.
- b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin kompleks dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yang cukup untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis yang terkait dengan Pengawasan.

2. Faktor Eksternal

- a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di OPD dimana adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan / diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD.
- b. Masih tidak optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan Hasil analisis Kebutuhan 2025 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Untuk kegiatan yang telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran maupun penyesuaian target capaian kinerja Sub Kegiatan antara lain adalah :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD 2025 telah menargetkan kinerja 4 dokumen dengan Pagu Rp. 100.000.000 menjadi 5 dokumen untuk target kinerjanya dengan pagu anggaran Rp. 450.000.000. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula menargetkan 2 laporan dengan pagu Rp. 100.000.000 menjadi 3 laporan terkait target kinerjanya dengan pagu Rp. 150.000.000. Jadi untuk kedua sub kegiatan tersebut mengalami penyesuaian target kinerja dan penambahan pagu sub kegiatan. Pada kegiatan ini juga telah mengalami penambahan sub kegiatan baru. Adapun sub kegiatan tersebut adalah :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk target kinerja 1 laporan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000.
 - 2) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, untuk target kinerja 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000.
 - 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk target kinerja 1 berita acara dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah menyesuaikan gaji tahun sebelumnya sebesar Rp. 15.608.271.494 dengan target kinerja 1176 orang/bulan. Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD telah dilakukan pengurangan pagu anggaran sub kegiatan. Pada kegiatan ini juga telah mengalami penambahan sub kegiatan baru yaitu sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target kinerja 1 dokumen, untuk pagu anggaran Rp. 25.000.000.
 - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah mengalami penambahan sub kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD telah menargetkan 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000 dan sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD juga telah menargetkan 1 laporan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000.
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu sebesar Rp.420.000.000 menyesuaikan keperluan pembayaran listrik, air dan internet kantor. Dan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp.2.098.969.164, penyesuaian terhadap Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu serta penyesuaian target kinerja sub kegiatan antara lain :
- a) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran awal Rp. 1.250.000.000 serta target kinerja 3 laporan menjadi pagu anggaran Rp.1.500.000.000 serta target kinerja 10 laporan.
 - b) Reviu Laporan Keuangan mengalami pengurangan pagu anggaran sub kegiatan yang semula sebesar Rp. 1.500.000.000 menjadi Rp.1.250.000.000,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi ada beberapa sub kegiatan telah mengalami penyesuaian target kinerja dan penambahan pagu sub kegiatan antara lain :

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan penambahan pagu anggaran yang semula Rp. 1.200.000.000 serta penyesuaian target kinerja 56 perangkat daerah menjadi Rp.1.500.000.000 untuk pagu anggaran dengan target kinerja 58 Perangkat Daerah.
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan penyesuaian pagu Rp.400.000.000,-
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan penyesuaian pagu Rp.1.000.000.000,-
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan penyesuaian pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,-

Tabel TC - 31

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 Nilai	20.623.931.658	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 Nilai	23.879.204.398	
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level				Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	200.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	750.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Penambahan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
2	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	Penambahan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
4	-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
5	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	14.810.245.362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan	15.862.601.894	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/ bulan	14.400.864.962	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/ bulan	15.608.271.494	Menyesuaikan Pagu Gaji tahun sebelumnya

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	309.380.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
9	-	-	-	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>40.800.000</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>115.800.000</i>	
10	-	-	-	-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.100.000.000	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	1.000.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1.000.000.000	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	100.000.000	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1.000.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	1.000.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	981.833.340	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	981.833.340	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	166.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	166.000.000	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350 Dokumen	100.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>30 Unit</i>	<i>500.000.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>30 Unit</i>	<i>500.000.000</i>	
22	-	-	-	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pagu Anggaran belum tersedia
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.091.052.956</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.668.969.164</i>	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Menyesuaikan Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.098.969.164	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Tenaga Ahli dan Outsourcing
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	900.000.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	10.200.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	10.200.000.000	
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	77 Dokumen	8.500.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	77 Dokumen	8.500.000.000	
31	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	
32	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.500.000.000	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan
33	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.250.000.000	Pengurangan Pagu Sub Kegiatan
35	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.250.000.000	
36	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	
37	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	
10	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>		<i>Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>19 Dokumen</i>	<i>1.700.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>		<i>Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>19 Dokumen</i>	<i>1.700.000.000</i>	
38	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	85 Persen	3.500.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	85 Persen	4.000.000.000	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	800.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	800.000.000	
40	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	
41	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	500.000.000	
12	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85 Dokumen	2.700.000.000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85 Dokumen	3.200.000.000	

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	1.200.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58 Perangkat Daerah	1.500.000.000	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	
43	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	400.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	
44	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	500.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.000.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	
45	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	300.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	
Jumlah					34.323.931.658	Jumlah					38.079.204.398	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki Usulan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat.

Tabel TC - 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan membahas tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang akan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Inspektorat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat atau Nasional. Proses tersebut dilakukan untuk melihat keselarasan antara tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat atau Nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Tugas pokok dan fungsi tersebut juga sama diampu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dibutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan baik di tingkat Daerah Kabupaten dan Provinsi yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Pusat atau Nasional khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengendalian internal melalui pengukuran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pelaksanaan percepatan pemberantasan KKN seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu dari sisi anggaran juga sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman penganggaran kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Misi “Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani” maka ditetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pengelolaan Pembangunan daerah telah merumuskan Program dan kegiatan periode tahun 2021 – 2026 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dimana rumusan program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Renja Kerja tahun 2025 ditetapkan 3 program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terbagi atas Program Prioritas yang merupakan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, dan Program Penunjang sebagai program kegiatan yang menopang Program Prioritas.

- b. Uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terdiri dari :

❖ **Program Prioritas.**

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sebanyak 2 program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan 9 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 10.200.000.000,-
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 4.000.000.000,-

❖ **Program Penunjang.**

Selain Program Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga di dukung dengan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan 29 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 23.879.204.398,-

- c. Untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah menyesuaikan pagu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota.
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD menyesuaikan pagu yang sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 309.380.400,- menjadi Rp. 204.330.400,-
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD telah mengalami penambahan pagu yang semula sebesar Rp.30.000.000,- menjadi 40.800.000.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mengalami penambahan pagu yang semula sebesar Rp.270.000.000,- menjadi Rp. 420.000.000,- berdasarkan Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga mengalami penambahan pagu semula sebesar Rp. 671.052.956,-

menjadi Rp. 2.098.969.164,- atas keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing.

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diawal RKPD tidak teranggarkan, pasca fasilitasi pembahasan rancangan akhir RKPD telah dianggarkan dengan pagu Rp.250.000.000,- atas keperluan Pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Jabatan pada Inspektorat.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pasca fasilitasi pembahasan rancangan akhir RKPD tidak mengalami perubahan baik pagu maupun target indikator kinerja.

- d. Program/Kegiatan yang telah menambah Sub Kegiatan baru adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp.50.000.000 dan target kinerja 1 Laporan.

b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan pagu Rp.50.000.000 dan target kinerja 1 Dokumen.

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp.50.000.000 dan target kinerja 1 Berita Acara.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan pagu Rp. 25.000.000,- dan target kinerja 1 Dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu Rp. 25.000.000,- dan target kinerja 1 Dokumen.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu Rp. 50.000.000,- dan target kinerja 1 Laporan.

Tabel TC - 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		88 Nilai	23.879.204.398			90 Nilai	20.623.931.658
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3 Level				3 Level	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja		11 Dokumen	750.000.000			6 Dokumen	200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	450.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	4 Dokumen	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	150.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	3 Laporan	100.000.000

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5 Laporan	15.862.601.894			3 Laporan	14.810.245.362
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	1176 Orang/ bulan	15.608.271.494	APBD Kukar	Menyesuaikan Pagu Gaji tahun sebelumnya	1176 Orang/ bulan	14.400.864.962
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan	1 Laporan	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	2 Laporan	204.330.400	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan	2 Laporan	309.380.400
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 Dokumen	115.800.000			1 Dokumen	40.800.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	1 Laporan	40.800.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	40.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 Dokumen	2.100.000.000			3 Dokumen	2.100.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	1.000.000.000	APBD Kukar	-	30 Orang	1.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	100.000.000	APBD Kukar	-	35 Orang	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	55 Orang	1.000.000.000	APBD Kukar	-	35 Orang	1.000.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	981.833.340			6 Layanan	981.833.340
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	15.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	150.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	150.000.000

2025
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	3 Paket	166.000.000	APBD Kukar	-	3 Paket	166.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	50.833.340	APBD Kukar	-	1 Paket	50.833.340
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	50 Laporan	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	350 Dokumen	100.000.000	APBD Kukar	-	250 Dokumen	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30 Unit	500.000.000			30 Unit	500.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	0 Unit	-	-	Pagu Anggaran belum tersedia	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	30 Unit	500.000.000	APBD Kukar	-	30 Unit	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	2.668.969.164			12 Bulan	1.091.052.956
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	420.000.000	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor	12 Laporan	270.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	150.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	150.000.000

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	2.098.969.164	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing	12 Laporan	671.052.956
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		15 Unit	900.000.000			15 Unit	900.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	1 Unit	200.000.000	APBD Kukar	-	1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	2 Unit	200.000.000	APBD Kukar	-	2 Unit	200.000.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan		97 Persen	10.200.000.000			97 Persen	10.200.000.000

2025
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan		77 Dokumen	8.500.000.000			77 Dokumen	8.500.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	-	5 Laporan	1.250.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	10 Laporan	1.250.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	16 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	-	16 Laporan	1.500.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Sub Kegiatan	3 Laporan	1.500.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	38 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	-	38 Laporan	1.250.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Kesepakat an	250.000.000	APBD Kukar	-	3 Kesepakat an	250.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD Kukar	-	2 Dokumen	1.500.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		19 Dokumen	1.700.000.000			19 Dokumen	1.700.000.000

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000	APBD Kukar	-	4 Laporan	200.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	-	15 Laporan	1.500.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPIP		85 Persen	4.000.000.000			100 Persen	3.500.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan		4 Dokumen	800.000.000			4 Dokumen	800.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	300.000.000	APBD Kukar		1 Rekomendasi	300.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Rekomendasi	500.000.000	APBD Kukar		3 Rekomendasi	500.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		85 Dokumen	3.200.000.000			85 Dokumen	2.700.000.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	58 Perangkat Daerah	1.500.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	58 Perangkat Daerah	1.200.000.000

2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	13 Perangkat Daerah	400.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	13 Perangkat Daerah	500.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Kegiatan	1.000.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	4 Kegiatan	500.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	300.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	10 Perangkat Daerah	500.000.000
JUMLAH				38.079.204.398				34.323.931.658

BAB V
PENUTUP

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode tahun ini yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait *Early Warning System*.
3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap laporan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawas.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional pengawasan.
6. Meningkatkan tunjangan aparatur pengawasan.
7. Mendorong salah satu *stakeholder* (masyarakat) untuk berperan serta dalam pengawasan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun Anggaran 2025.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun strategi yang merupakan langkah sistematis yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar program dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran adalah :

1. Melakukan kegiatan Pengawasan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi.
2. Melakukan kegiatan konsultasi, pendampingan dan pembinaan.
3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
4. Penyediaan peralatan dan bahan penunjang kinerja pengawasan.
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peran serta pengawasan masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja 2025 ini diharapkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan, serta nantinya dapat mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra.

Tenggarong, Juli 2024

Inspektur,



H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSP

Pembina Tingkat I

NIP. 197908012001121001